

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA NERANG JAYA DESA NGERANGAN

Sinta Rizkiana¹, Agus Hardaya², Catur Suwastanto³

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani Klaten

Email: catur.pts@gmail.com¹

Agus.hardaya@gmail.com²

rizqianasinta@gmail.com³

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa merupakan upaya pengelola Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa Nerang Jaya Desa Ngerangan Kecamatan Bayat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi bisa tersampaikan dari BUMDes kepada pelaku usaha dengan baik dan jelas. Tetapi masih ada permasalahan kurangnya waktu untuk menyampaikan informasi. Faktor peningkatan kualitas SDM telah diberikan BUMDes kepada pelaku usaha berupa tambahan ilmu marketing, tempat penjualan, dan tambahan modal. Tetapi masih ada permasalahan pemasaran produk belum bisa menjangkau pelanggan lebih banyak dan permasalahan tarif parkir yang mahal. Faktor sikap pelaksana dapat dilaksanakan oleh BUMDes kepada pelaku usaha dengan menerapkan sikap yang baik, memiliki semangat yang tinggi, dan tidak membedakan dalam melayani konsultasi. Tetapi masih ada permasalahan mindset individual dari pelaku usaha dan waktu dari pelaku usaha semakin padat/repot karena banyaknya kegiatan PKK. Faktor struktur Organisasi telah dilaksanakan oleh BUMDes. Dengan membentuk struktur kepengurusan organisasi berdasarkan Permen Desa PDTT 3 tahun 2021 yang memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat; BUMDes

ABSTRACT

Community empowerment through Village-Owned Enterprises is an effort by the management of Village-Owned Enterprises to improve community welfare. The aim of this research is to find out how the community empowerment program is implemented through the Nerang Jaya Village-Owned Enterprise, Ngerangan Village, Bayat District. The research method used in this research is a qualitative approach. The research results show that communication factors can be conveyed from BUMDes to business actors well and clearly. But there is still the problem of lack of time to convey information. BUMDes has provided factors to improve the quality of human resources to business actors in the form of additional marketing knowledge, sales locations and additional capital. But there are still problems with product marketing not being able to reach more customers and the problem of expensive parking fees. The implementing attitude factor can be implemented by BUMDes for business actors by implementing a good attitude, having high enthusiasm, and not discriminating in providing consultations. However, there are still problems with the individual mindset of business actors and the time of business actors is increasingly busy due to the large number of PKK activities. Organizational structure factors have been implemented by BUMDes. By forming an organizational management structure based on PDTT Village Ministerial Regulation 3 of 2021, each of which has its own duties and obligations.

Submitted: January 2022, **Accepted:** January 2022, **Published:** March 2022

ISSN: 2808-7267 (online), Website: <http://journal.stiamadani.ac.id>

Keywords : *community development, Bumdes*

PENDAHULUAN

Kabupaten adalah daerah yang memiliki segudang potensi dan sumberdaya alam yang melimpah, demikian pula ada salah satu Desa di Kabupaten Klaten yang sedang mengembangkan potensi terpendamnya khususnya Desa Ngerangan yang berada di Kecamatan Bayat. Desa Ngerangan merupakan Desa yang wilayahnya terletak berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul Jogjakarta. Berdasarkan dari data monografi desa pada tahun 2021 yang peneliti dapatkan dari Perangkat Desa, bahwa kebanyakan dari masyarakat Desa Ngerangan berprofesi sebagai buruh, ada sekitar 2.735 jiwa yang berprofesi sebagai buruh tani dan buruh kebun, dan disamping itu pula, mayoritas warga Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat, Klaten, menekuni profesi sebagai pedagang angkringan secara turun menurun, ada lebih dari 600 keluarga di Desa Ngerangan yang berprofesi sebagai pedagang angkringan, dan jumlah sebagai karyawan swasta juga terhitung cukup besar.

Pada masa kini Desa Ngerangan sedang membangun desa, yakni sebagai desa wisata kuliner, Pemerintah Desa Ngerangan berharap dengan adanya pembangunan desa sebagai desa wisata dapat menjadikan perekonomian warga setempat meningkat. Pemerintah Desa Ngerangan bermitra dengan Badan Usaha Milik Desa dalam

mengelola desa sebagai desa wisata, dengan berusaha menggerakkan warga masyarakat supaya memiliki kesadaran untuk membangun desa menjadi lebih maju, yakni dengan adanya program memberdayakan warga masyarakat melalui pengembangan potensi dan keterampilan warga khususnya pemberdayaan bagi kelompok Ibu-ibu PKK tingkat RT se-Desa Ngerangan.

Menurut siagian (1983), Pembangunan adalah sebuah rangkaian usaha untuk menumbuhkan ataupun merubah yang dilaksanakan secara sadar oleh semua warga negara untuk menuju pada sesuatu yang modern di dalam membina bangsa (*national building*). Sedangkan menurut Sumodiningrat (1999), mengatakan bahwa Pembangunan adalah suatu inti yang memiliki sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, bisa mengangkat derajat masyarakat dengan jumlah yang sebanyak banyaknya, dan bisa merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan lebih layak dari sebelumnya (Kurniawati, 2013).

Pemberdayaan berasal dari kata esensial daya yang berarti mengandung arti “kekuatan” dan merupakan interpretasi istilah dari bahasa Inggris, untuk lebih spesifik “*empowerment*” sehingga sangat baik dapat dijelaskan bahwa penguatan berarti memberi kekuatan atau solidaritas kepada

perkumpulan lemah yang belum memiliki kekuatan atau solidaritas untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar/kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari seperti makanan, pakaian atau sandang, penginapan atau tempat berlindung, pelatihan, kesejahteraan. Tugas otoritas publik memanglah untuk memberikan kekuatan atau “*power*” dan juga harus mendapatkan bantuan penuh dari berbagai kelompok, terutama dukungan dari daerah itu sendiri, untuk lebih spesifik dengan ikut berperan serta dalam pelaksanaan setiap program pemberdayaan. Mardikanto dan Soebiato (2012), berpendapat bahwa proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang berarti untuk memperkuat dan memajukan keberdayaan masyarakat yang tidak berdaya, misalnya, individu yang mengalami masalah kebutuhan, atau berpotensi dapat diuraikan sebagai siklus yang diatur untuk membangun ukuran pembaruan utilitas dari objek yang diberdayakan. Sedangkan Gunawan (2009), mendinifisikan tentang

pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan sosial dimana penduduk berjalan sebagai sebuah kelompok organisme yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan secara bersama yang mempunyai tujuan untuk mengurus masalah sosial atau menangani masalah sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Dika Amir Pratama, 2016).

Mengingat latar belakang yang digambarkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Nerang Jaya Desa Ngerangan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten?”. Adapun tujuan dari peneliti ini adalah “Untuk mengetahui bagaimana implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa Nerang Jaya Desa Ngerangan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten”

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi

Pengertian Implementasi

Kadir berpendapat tentang pengertian Implementasi yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan untuk mempraktikan sistem yang didapatkan dari kegiatan seleksi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi yaitu sebuah proses yang digunakan untuk menguji antara

konsep dengan konseptual atau antara tex dengan konteks. Sedangkan Fullan berpendapat mengenai pengertian Implementasi menurut yaitu suatu proses untuk melakukan ide, program ataupun seperangkat kegiatan baru dengan harapan agar orang lain dapat menerima atau mau melakukan perubahan. Berdasarkan pengertian implementasi yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menilai, mengevaluasi dan

mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik ataukah tidak, dengan demikian maka akan ada nilai apakah harus ada evaluasi ataukah tidak terhadap program tersebut (Rahmat, 2017).

Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi

Menurut George Edwards III (1980), berpendapat bahwa: ada empat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan meliputi: satu: Komunikasi, dua: Sumber Daya Manusia, tiga: Sikap pelaksana/attitud, empat: Struktur birokrasi/struktur organisasi. Dari ke-empat faktor tersebut diatas merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, karena dari ke-empat faktor tersebut diatas memiliki hubungan yang saling berkaitan antara faktor satu dengan yang lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata esensial daya yang berarti mengandung arti “kekuatan” dan merupakan interpretasi istilah dari bahasa Inggris, untuk lebih spesifik “*empowerment*” sehingga sangat baik dapat dijelaskan bahwa penguatan berarti memberi kekuatan atau solidaritas kepada perkumpulan lemah yang belum memiliki kekuatan atau solidaritas untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar/kebutuhan dasar

kehidupan sehari-hari seperti makanan, pakaian atau sandang, penginapan atau tempat berlindung, pelatihan, kesejahteraan. Tugas otoritas publik memanglah untuk memberikan kekuatan atau “*power*” dan juga harus mendapatkan bantuan penuh dari berbagai kelompok, terutama dukungan dari daerah itu sendiri, untuk lebih spesifik dengan ikut berperan serta dalam pelaksanaan setiap program pemberdayaan. Sedangkan Gunawan (2009), mendefinisikan tentang pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas sosial dimana penduduk berjalan sebagai sebuah kelompok organisme yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan secara bersama yang mempunyai tujuan untuk mengurus masalah sosial atau menangani masalah sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Dika Amir Pratama, 2016).

Faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat

George Edward III, G.C (2007), berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: **satu:** Komunikasi (*communication*). Keberhasilan komunikasi dapat dilihat dari bagaimana seorang pelaksana kebijakan bisa menerimanya yang disampaikan oleh para pembuat kebijakan dengan jelas, ketika menyampaikan komunikasi harus jelas, mudah dipahami, dan tidak ambigu, sehingga

tidak terjadi miskomunikasi, dan tidak terjadi penyelewengan tujuan dari suatu kebijakan yang ditetapkan. Sepertihalnya para penyampaipada menyampaikan suatu kebijakan yang membingungkan dapat menjadikan pelaksana kebijakan kebingungan dalam menjalankan kebijakan dan akhirnya tujuan dari kebijakan tidak tercapai. **Dua** Sumber Daya Manusia (*resources*). Sumber Daya Manusia akan mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat, karena kualitas dan jasa pelayanan dari daya tersebut dapat memberikan daya saing suatu perusahaan ataupun organisasi, maka dari itu pentingnya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia agar pemberdayaan masyarakat dapat tercapai dengan baik. **Tiga:** Sikap Pelaksana. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh sikap pelaksanaan kebijakan. Dari bagaimana sikap seorang pemimpin dalam memberdayakan bawahannya untuk meningkatkan potensi yang dimiliki. Atau sikap pelaku kebijakan terhadap pemimpinnya dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. **Empat:** Struktur birokrasi/Organisasi. Struktur organisasi/birokrasi dapat mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan. Dengan adanya perilaku struktur birokrasi yang baik maka dapat memperkuat roh atau jiwa kedinamisan sebuah struktur birokrasi. Atau bisa disebut juga bahwa struktur birokrasi merupakan jembatan dari perjalanan suatu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (Daraba, 2015).

Badan Usaha Milik Desa

Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah lembaga usaha yang dikelola bersama oleh Pemerintah Desa dengan masyarakat bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan lembaga ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut (Kholilatul Arifah, 2019). Menurut peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010. Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu usaha desa yang didirikan atau dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat (Prasetyo, 2017). Badan Usaha Milik Desa dibentuk mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan dan keuntungan tersebut dimanfaatkan oleh desa dan masyarakat. Menurut pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan desa salah satunya adalah pendapatan asli desa yang meliputi: Hasil Usaha Desa, Hasil kekayaan Desa, Hasil swadaya, Hasil partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain hasil pendapatan asli desa yang sah (Rizki, 2019).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa

Ada beberapa faktor penyokong yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu Badan Usaha Milik Desa yaitu: **Satu:** Modal, merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan Badan Usaha Milik Desa, karena dalam sebuah

dunia usaha modal sangat dibutuhkan. Semakin banyak modal yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa maka akan semakin besar pula pendapatan yang diperoleh/dihasilkan. **Dua:** Kebijakan Pemerintah Desa yang mengenai Badan Usaha Milik Desa, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Desa mengenai Badan Usaha Milik Desa, dimana peraturan Desa tersebut mendukung terhadap aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa. **Tiga:** Sumber Daya Manusia, Pengurus, karyawan serta masyarakat atau petani yang memiliki Pengetahuan dan pemahaman tentang Badan Usaha Milik Desa dapat menyebabkan tercapai atau tidaknya tujuan dari Badan Usaha Milik Desa. **Empat:** Manajemen

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek penelitian berjumlah delapan orang yang terdiri dari BUMDesa, Pemerintah Desa, Pelaku usaha, dan Masyarakat. Metode pengambilan sample dengan teknik purposive sampling yang merupakan teknik sampel betujuan yaitu sampel

sebuah organisasi akan berjalan dengan baik dan terarah jika memiliki manajemen yang baik, seperti halnya Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa akan berjalan dengan baik dan terarah jika memiliki manajemen yang baik. **Lima:** Fasilitas Dan Sarana Badan Usaha Milik Desa, merupakan suatu wadah yang digunakan oleh karyawan Badan Usaha Milik Desa dan pengurus dalam mencapai target Badan Usaha Milik Desa yang optimal, jika fasilitas dan sarana yang diberikan Badan Usaha Milik Desa belum memadai maka akan menyebabkan pelayanan administrasi Badan Usaha Milik Desa menjadi belum optimal (Kholilatul Arifah, 2019).

yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dalam teknik purposive sampling peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi yang mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang valid. Peneliti menggunakan metode analisis data menurut Miles Dan Huberman. Penelitian berlangsung dari bulan Maret-Juli Tahun 2021 di Desa Ngerangan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

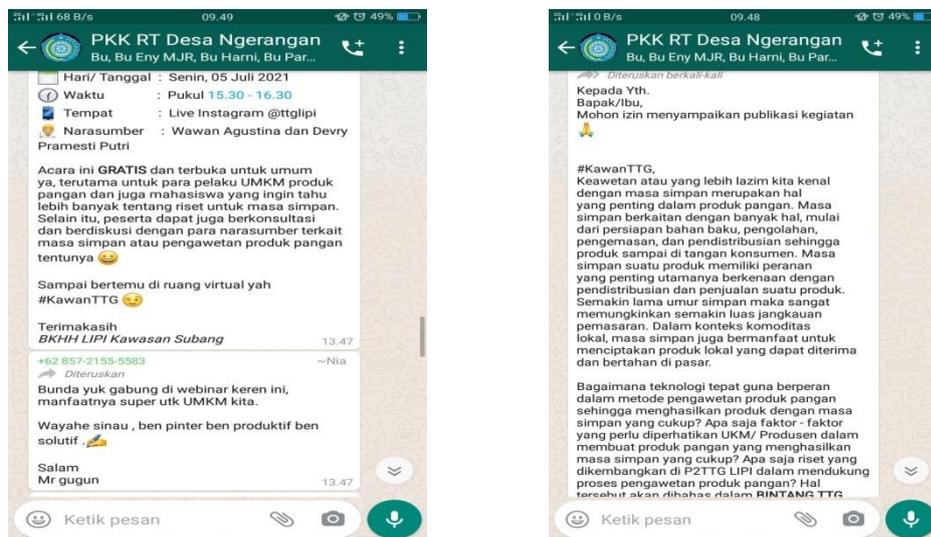
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi, Sumber Daya manusia, sikap

pelaksana, dan struktur organisasi dapat berjalan dengan baik. **Satu Komunikasi.** Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan bahwa Badan Usaha Milik Desa telah memenuhi kriteria keberhasilan komunikasi di dalam memberdayakan masyarakat menurut George Edward III (2007), Menurut George Edward III (2007), keberhasilan komunikasi dapat dilihat dari bagaimana seorang pelaksana kebijakan bisa menerima apa yang disampaikan oleh para pembuat kebijakan dengan baik dan jelas, ketika menyampaikan komunikasi harus jelas, mudah dipahami, dan tidak ambigu, sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara

pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan, dan tidak terjadi penyelewengan tujuan dari suatu kebijakan yang ditetapkan. Faktor komunikasi bisa tersampaikan dari BUMDes kepada pelaku usaha dengan baik dan jelas. Karena berdasarkan data bahwa pada saat BUMDes memberikan informasi kepada pelaku usaha melalui grup whatsapp dapat diterima langsung oleh pelaku usaha dengan waktu yang cepat atau bisa bertatap muka langsung datang ke kantor desa. Tetapi masih ada permasalahan kurangnya waktu untuk menyampaikan informasi pada saat BUMDes melayani konsultasi bagi pelaku usaha.

Gambar 1. Komunikasi BUMDes dengan Pelaku Usaha melalui grup whatsapp



Sumber: Data Primer Grup Whatsapp PKK RT Desa Ngerangan 2021

Dua Sumber Daya manusia

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan bahwa Badan Usaha Milik Desa telah memenuhi kriteria keberhasilan sumber daya manusia di dalam memberdayakan masyarakat menurut

George Edward III (2007). Menurut George Edward III (2007), Sumber Daya Manusia akan mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat, karena kualitas dan jasa pelayanan dari daya tersebut dapat memberikan daya saing suatu perusahaan

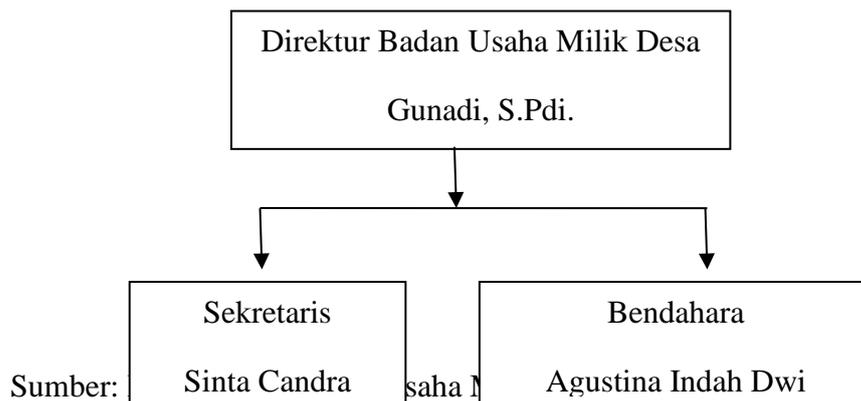
ataupun organisasi, maka dari itu pentingnya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia agar pemberdayaan masyarakat dapat tercapai dengan baik. Faktor peningkatan kualitas SDM telah diberikan BUMDes kepada pelaku usaha berupa tambahan ilmu marketing, tempat penjualan, dan tambahan modal. Karena berdasarkan data bahwa BUMDes bersama Pemerintah Desa telah berusaha meningkatkan kualitas SDM Ibu-ibu PKK melalui pemberian tambahan ilmu marketing yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2021 jam 13:30 bertempat di Balai Desa Ngerangan. Tetapi masih ada permasalahan pemasaran produk belum bisa menjangkau pelanggan lebih banyak dan permasalahan tarif parkir yang mahal. **Tiga Sikap Pelaksana.** Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan bahwa Badan Usaha Milik Desa telah memenuhi kriteria keberhasilan sikap pelaksana di dalam memberdayakan masyarakat menurut George Edward III (2007), Menurut George Edward III (2007), Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh sikap pelaksanaan kebijakan, dari bagaimana sikap seorang pemimpin dalam memberdayakan bawahannya untuk meningkatkan potensi yang dimiliki, ataupun sikap pelaku kebijakan terhadap pemimpinnya dalam menjalankan

kebijakan yang telah ditetapkan. Faktor sikap pelaksana dapat dilaksanakan oleh BUMDes kepada pelaku usaha dengan menerapkan sikap yang baik, memiliki semangat yang tinggi, dan tidak membedakan dalam melayani konsultasi. Karena berdasarkan data bahwa pelaku usaha ketika datang ke Kantor Desa pada tanggal 28 Maret 2021 jam 09:00 telah dilayani dengan baik. Tetapi masih ada permasalahan mindset individual dari pelaku usaha dan waktu dari pelaku usaha semakin padat/repot karena banyaknya kegiatan PKK. **Empat struktur organisasi.** Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan bahwa Badan Usaha Milik Desa telah memenuhi kriteria keberhasilan struktur organisasi di dalam memberdayakan masyarakat menurut George Edward III (2007). Menurut George Edward III (2007), Struktur birokrasi dapat mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan, dengan adanya perilaku struktur birokrasi yang baik maka dapat memperkuat roh atau jiwa kedinamisan sebuah struktur birokrasi, atau bisa disebut juga bahwa struktur birokrasi merupakan jembatan dari perjalanan suatu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Faktor struktur Organisasi telah dilaksanakan oleh BUMDes. Dengan membentuk struktur kepengurusan organisasi berdasarkan

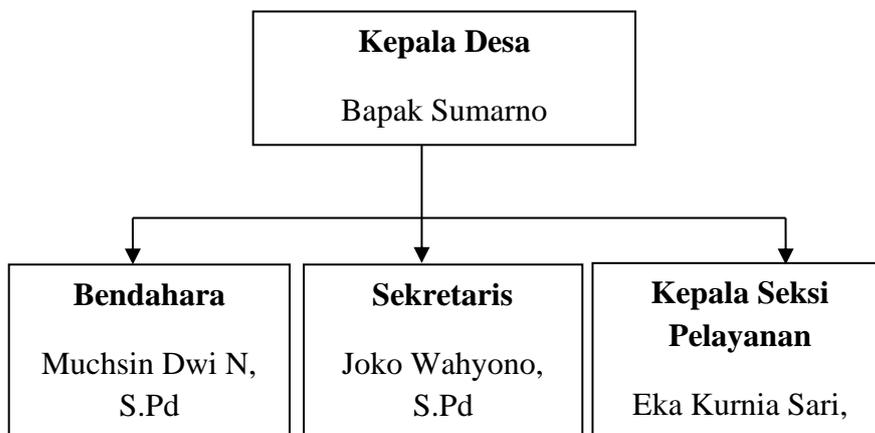
Permen Desa PDTT 3 tahun 2021 yang memiliki tugas dan kewajibannya masing-

masing. Bumdes dalam memberdayakan masyarakat dibantu oleh Pemerintah Desa.

Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa



Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa



Sumber: Data Primer Badan Usaha Milik Desa Ngerangan 2021

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa Nerang Jaya telah mampu mengelola pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan Ibu-ibu PKK tingkat RT se-Desa

Ngerangan sudah berhasil menurut teori dari George Edward III (2007), yaitu berhasil di dalam berkomunikasi, Sumber Daya Manusianya, sikap pelaksanaannya, serta struktur orgaisasi/birokrasinya, Badan Usaha Milik Desa di bantu oleh Perangkat Desa dalam mengelola pemberdayaan tersebut,

keberhasilan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Nerang Jaya bersama dengan Pemerintah Desa dapat dilihat sebagai berikut: **Satu:** Badan Usaha Milik Desa telah memenuhi kriteria keberhasilan komunikasi di dalam memberdayakan masyarakat. Para pelaku usaha telah menerima informasi dengan baik dan jelas. Informasi melalui whatsapp yang disampaikan oleh Badan Usaha Milik Desa bersama Pemerintah Desa bagi para pelaku usaha, khususnya ketua dari masing-masing PKK RT dapat disampaikan informasi tersebut kepada seluruh anggotanya. Miskomunikasi ketika menjalankan suatu kebijakan yang telah ditetapkan tidak terjadi. **Dua:** Badan Usaha Milik Desa telah memenuhi kriteria keberhasilan Sumber Daya Manusia dimana Badan Usaha Milik Desa bersama Pemerintah Desa telah meningkatkan kualitas SDM Ibu-ibu PKK tingkat RT se-Desa Ngerangan. Dilakukan dengan memberikan tambahan ilmu berjualan berupa sosialisasi marketing, tambahan modal usaha, dan tempat penjualan. Upaya pengembangan tersebut agar para pelaku usaha lebih bersemangat di dalam mengembangkan potensi usahanya. **Tiga:** Badan Usaha Milik Desa bersama Pemerintah Desa telah memenuhi kriteria keberhasilan sikap pelaksana. Badan Usaha Milik Desa telah menerapkan sikap yang sabar, semangat yang tinggi, tidak membedakan antar pelaku usaha satu dengan yang lain. Pelayanan konsultasi bagi Ibu-ibu PKK yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan, pemberian dukungan bagi para pelaku usaha dengan cara memberi tambahan

modal usaha, tempat penjualan dan menggerakkan warga masyarakat untuk mengikuti giat kerja bakti untuk menciptakan desa yang aman, tertib, dan indah. **Empat:** Badan Usaha Milik Desa bersama Pemerintah Desa telah memenuhi kriteria struktur Organisasi Birokrasi yang baik. Badan Usaha Milik Desa dan Pemerintah Desa telah membentuk struktur kepengurusan berdasarkan Permen Desa PDPT 3 tahun 2021 yang memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing sebagai jembatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Nerang Jaya bersama Struktur Birokrasi yang ada di Desa Ngerangan memiliki jiwa dinamis yang kuat dalam memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan temuan-temuan di lapangan peneliti memberikan saran: **Satu:** BUMDes merasa bahwa waktunya yang padat dalam menyampaikan informasi, melayani konsultasi dan mendampingi bagi pelaku usaha. Peneliti memberi saran supaya menambah tenaga kerja baru agar BUMDes tidak kewalahan dalam melayani konsultasi bagi PKK RT se-Desa Ngerangan. **Dua:** Pelaku usaha belum bisa menjualkan produk usahanya melalui market place. Pelaku usaha baru bisa menitipkan ke warung, dan dijual sendiri melalui whatsapp. Peneliti memberi saran agar BUMDes mengadakan pelatihan usaha misal saja pelatihan usaha melalui market place dengan mentor yang ahli dibidangnya. Sehingga pelaku usaha dapat memulai menjual produknya melalui market place dan dapat menjangkau

pelanggan lebih banyak. **Tiga:** Masyarakat merasa tarif parkir yang mahal pada saat berkunjung di bazar *show case*. Peneliti memberi saran agar BUMDes dan Pemerintah Desa menambah tenaga kerja resmi yang bertugas sebagai tukang parkir dan tidak memberikan tarif parkir kepada pengunjung. Atau peneliti memberi saran agar tarif parkir ditetapkan oleh BUMDes dan Pemerintah Desa supaya tarif parkir dibawah 2000 rupiah. **Empat:** Mindset pelaku usaha yang individual dan enggan bersosial. Peneliti memberi saran kepada BUMDes supaya selalu memberikan dorongan semangat dan bimbingan kepada ketua PKK dari

masing-masing RT supaya bisa menggerakkan anggota kelompoknya agar anggota yang masih memiliki mindset individual dapat bersosial dengan baik dengan anggota yang lain dalam menjalankan usaha kelompoknya. **Lima:** Pelaku usaha merasa bahwa dengan banyaknya kegiatan Ibu-ibu PKK waktunya bertambah repot/atau padat. Peneliti memberi saran kepada pelaku usaha supaya mengurangi kegiatan-kegiatan yang mungkin kegiatan tersebut bisa dilakukan melalui meeting online misal saja meeting melalui zoom, atau skype dan lain sebagainya sehingga waktunya fleksibel dan tidak perlu keluar rumah.

DAFTAR PUSTAKA

Daraba, D. (2015). *Factors Affecting the Success Empowerment Program of the Poor*. *Sosiohumaniora*, 17 (2), 168-169.

Dika Amir Pratama, W. (2016). Evaluasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *J+Plus Unesa* (Vol. 5, Issue 1).

Kholilatul Arifah, L. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol.

53, Issue 9).

Kurniawati, D. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota MojokeRTo). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1 (4), 9-14.

Rahmat, D. (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat. 04, 35-42.

Rizki, F. F. (2019). Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Di Desa Rocek Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Oleh: Fery Fadli Rizki Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Banten Raya Abstrak. 15 (September), 33-40.